



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 67-78
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pola Rekrutmen Politik Perempuan dalam Partai Politik: Studi Komparatif Partai Demokrat dan Partai Golkar

Kristina Kuryestra Halawa^{1*}, Rizki Saiful Bahri², Ika Arinia Indryany³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: 6670230137@untirta.ac.id¹

Article Info :

Received:
23-02-2026
Revised:
10-03-2026
Accepted:
14-03-2026

Abstract

Women's political recruitment in Indonesian political parties reflects a complex interaction between institutional regulations, party organizational structures, and socio-cultural dynamics shaping women's political participation. This study examines the patterns of women's political recruitment through a comparative analysis of the Democratic Party and the Golkar Party. Using a qualitative approach based on document analysis and literature review, the study explores how internal party mechanisms, cadre development systems, and electoral dynamics influence the opportunities for female legislative candidates. The findings indicate that both parties formally support women's participation through organizational structures, training programs, and the fulfillment of gender quota provisions mandated by national electoral regulations. However, the effectiveness of these commitments is constrained by internal party competition, the prioritization of candidate electability, and the persistence of male-dominated political networks. Within the open proportional electoral system, electoral success increasingly depends on candidates' personal vote-mobilization capacity, which often places women at a structural disadvantage due to limited access to political resources and networks. Consequently, strengthening women's representation requires not only regulatory compliance but also institutional reforms, stronger cadre development for women, and more inclusive political practices within party organizations.

Keywords: Women Political, Political Parties, Gender Representation, Electoral, Indonesia.

Abstrak

Perekrutan perempuan dalam partai-partai politik Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks antara peraturan kelembagaan, struktur organisasi partai, dan dinamika sosio-budaya yang membentuk partisipasi politik perempuan. Penelitian ini mengkaji pola-pola perekrutan perempuan melalui analisis komparatif antara Partai Demokrat dan Partai Golkar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada analisis dokumen dan tinjauan pustaka, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mekanisme internal partai, sistem pengembangan kader, dan dinamika pemilu memengaruhi peluang bagi calon legislatif perempuan. Temuan menunjukkan bahwa kedua partai secara formal mendukung partisipasi perempuan melalui struktur organisasi, program pelatihan, dan pemenuhan ketentuan kuota gender yang diwajibkan oleh peraturan pemilu nasional. Namun, efektivitas komitmen ini dibatasi oleh persaingan internal partai, prioritas terhadap elektabilitas calon, dan masih berlanjutnya jaringan politik yang didominasi laki-laki. Dalam sistem pemilihan proporsional terbuka, keberhasilan pemilihan semakin bergantung pada kemampuan mobilisasi suara pribadi para calon, yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan secara struktural karena akses yang terbatas terhadap sumber daya dan jaringan politik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga reformasi kelembagaan, pengembangan kader perempuan yang lebih kuat, serta praktik politik yang lebih inklusif di dalam organisasi partai.

Kata kunci: Perempuan dalam Politik, Partai Politik, Representasi Gender, Pemilu, Indonesia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan studi tentang representasi politik perempuan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pergeseran perhatian dari sekadar persoalan akses formal menuju analisis yang lebih kompleks mengenai mekanisme institusional yang membentuk peluang perempuan dalam sistem politik demokratis. Literatur global menempatkan partai politik sebagai institusi kunci yang menentukan pola representasi karena partai berfungsi sebagai gerbang utama dalam proses seleksi kandidat, kaderisasi,

dan distribusi sumber daya politik yang memengaruhi komposisi lembaga legislatif (Pippa Norris, 2006; Richard S. Katz & William Crotty, 2006). Dalam kerangka ini, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya dipahami sebagai isu kesetaraan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari kualitas demokrasi yang memengaruhi substansi kebijakan publik dan inklusivitas institusi politik (Esi Asiedu et al., 2018). Diskursus tersebut memperoleh dimensi teoretis yang lebih kritis melalui perspektif konstruktivis mengenai gender yang menekankan bahwa identitas dan peran politik perempuan dibentuk melalui praktik sosial dan relasi kekuasaan yang terinstitusionalisasi dalam organisasi politik (Judith Butler, 1990). Perkembangan kajian ini memperlihatkan bahwa analisis mengenai representasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur internal partai, termasuk pola rekrutmen politik yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap ruang kompetisi elektoral.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota gender merupakan instrumen yang secara empiris mampu meningkatkan peluang perempuan untuk memasuki lembaga legislatif, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada desain kelembagaan dan praktik organisasi partai. Kajian komparatif mengenai sistem rekrutmen kandidat menunjukkan bahwa partai dengan mekanisme kaderisasi yang terinstitusionalisasi cenderung menghasilkan proses seleksi yang lebih terbuka dan inklusif dibandingkan partai yang bergantung pada patronase elite atau jaringan informal (Pippa Norris, 2006). Dalam konteks Indonesia, literatur mengenai sistem kepartaian menunjukkan bahwa struktur partai masih dipengaruhi oleh kombinasi antara organisasi formal dan praktik patronase politik yang membentuk dinamika perekrutan kandidat (Miriam Budiardjo, 2015; Syamsuddin Haris, 2014). Analisis terhadap institusionalisasi partai di Indonesia bahkan menegaskan bahwa ketahanan organisasi partai sering kali ditentukan oleh kemampuan partai mengelola kaderisasi dan distribusi posisi politik secara strategis (Leo Agustino et al., 2023). Pada saat yang sama, studi mengenai profesionalitas anggota legislatif menunjukkan bahwa kualitas rekrutmen politik dalam partai secara langsung memengaruhi kapasitas representasi di parlemen (Rico Antonio, 2023). Sintesis temuan tersebut memperlihatkan bahwa partai politik bukan hanya arena kompetisi elektoral, melainkan institusi yang menentukan struktur peluang politik bagi perempuan.

Walaupun literatur tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai representasi gender dalam politik, sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris masih terlihat dalam kajian yang ada. Sebagian besar penelitian mengenai keterwakilan perempuan di Indonesia masih menitikberatkan pada dimensi kuantitatif, khususnya pada tingkat pencapaian kursi legislatif, tanpa mengkaji secara mendalam mekanisme internal partai yang menghasilkan angka representasi tersebut. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai kuota perempuan telah diterapkan, keterwakilan perempuan di parlemen nasional masih berada di bawah ambang batas 30 persen yang secara normatif dipandang sebagai critical mass bagi representasi substantif (GoodStats, 2024; Kompas, 2024). Laporan mengenai pencalonan legislatif juga menunjukkan bahwa sejumlah partai politik masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kuota kandidat perempuan di beberapa daerah pemilihan (Kompas, 2023; MedanBisnisDaily, 2023). Inkonsistensi antara regulasi afirmatif dan praktik rekrutmen tersebut menimbulkan pertanyaan teoretis mengenai sejauh mana partai politik benar-benar mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam proses seleksi kandidat.

Keterbatasan dalam literatur ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih jauh bagaimana dinamika organisasi partai memediasi implementasi kebijakan afirmatif dalam praktik politik sehari-hari. Kuota perempuan pada dasarnya merupakan instrumen normatif yang dirancang untuk memperluas akses perempuan terhadap arena politik formal, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor internal partai seperti pola kaderisasi, jaringan kekuasaan, serta distribusi sumber daya politik. Realitas bahwa jumlah perempuan dalam parlemen Indonesia masih berada pada kisaran sekitar seperlima dari total anggota legislatif menunjukkan bahwa hambatan struktural dan kultural tetap memengaruhi proses rekrutmen politik (Kompas, 2024; GoodStats, 2024). Dalam konteks ini, isu patriarki organisasi, dominasi elite partai, dan ketimpangan akses terhadap modal politik sering kali membatasi peluang perempuan untuk berkompetisi secara setara dalam proses pencalonan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan representasi gender tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah regulasi, melainkan sebagai fenomena institusional yang terkait erat dengan budaya politik dan struktur organisasi partai.

Analisis yang berfokus pada pola rekrutmen politik dalam partai politik menjadi penting karena proses tersebut merupakan titik krusial yang menentukan siapa yang dapat memasuki arena kompetisi elektoral. Kajian mengenai sistem kepartaian menunjukkan bahwa setiap partai memiliki karakteristik

organisasi, pola kaderisasi, dan jaringan kekuasaan yang berbeda, sehingga menghasilkan dinamika rekrutmen yang tidak seragam (Syamsuddin Haris, 2014; Richard S. Katz & William Crotty, 2006). Dalam kerangka ini, membandingkan dua partai besar di Indonesia dengan sejarah, struktur organisasi, dan basis dukungan politik yang berbeda memberikan peluang analitis untuk memahami bagaimana variasi institusional memengaruhi peluang perempuan dalam proses seleksi kandidat. Perbandingan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar menawarkan konteks empiris yang relevan untuk menelaah bagaimana mekanisme kaderisasi, jaringan elite, dan strategi elektoral partai membentuk pola rekrutmen politik perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pola rekrutmen politik perempuan dalam dua partai politik besar di Indonesia dengan menelaah mekanisme kaderisasi, proses seleksi kandidat, serta faktor-faktor organisasi yang memengaruhi peluang perempuan dalam memperoleh posisi politik. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif, penelitian ini memanfaatkan analisis literatur, telaah dokumen partai, serta wawancara dengan anggota legislatif perempuan untuk mengidentifikasi dinamika internal partai yang membentuk akses politik perempuan. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif institusional partai dengan analisis gender dalam politik, sekaligus menawarkan pemahaman empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana variasi organisasi partai memengaruhi implementasi kebijakan afirmatif dalam praktik rekrutmen politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang dirancang untuk memahami secara mendalam dinamika rekrutmen politik perempuan dalam partai politik serta faktor-faktor institusional yang memengaruhi peluang perempuan dalam memperoleh posisi politik. Desain penelitian menggunakan metode studi komparatif terhadap dua partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar, yang dipilih karena memiliki sejarah politik, struktur organisasi, serta basis dukungan elektoral yang berbeda sehingga memungkinkan analisis perbandingan yang lebih komprehensif mengenai pola rekrutmen kader perempuan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan beberapa anggota legislatif perempuan yang memiliki pengalaman langsung dalam proses rekrutmen politik dan kaderisasi partai. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen yang mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, regulasi terkait partai politik dan pemilu, serta dokumen organisasi partai seperti pedoman kaderisasi, struktur kepengurusan, dan informasi yang tersedia pada situs resmi partai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu telaah literatur sistematis, analisis dokumen kelembagaan partai, serta wawancara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik organisasi dalam proses rekrutmen politik perempuan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif komparatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, mekanisme, serta variasi institusional dalam proses rekrutmen politik perempuan pada kedua partai yang diteliti. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, penyajian data, serta penarikan kesimpulan analitis yang menekankan hubungan antara struktur organisasi partai, mekanisme kaderisasi, dan peluang pencalonan perempuan dalam kompetisi elektoral. Proses komparasi dilakukan dengan membandingkan praktik rekrutmen politik, mekanisme seleksi kandidat, serta dukungan organisasi terhadap kader perempuan di masing-masing partai, sehingga dapat diidentifikasi persamaan maupun perbedaan pola institusional yang memengaruhi keterwakilan perempuan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen organisasi partai, serta temuan dari literatur akademik yang relevan. Selain itu, interpretasi data dilakukan secara reflektif dengan mempertimbangkan konteks institusional dan dinamika politik internal partai, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga memberikan pemahaman analitis mengenai hubungan antara struktur partai, proses rekrutmen, dan representasi gender dalam politik elektoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Normatif dan Implementasi Kebijakan Afirmasi dalam Rekrutmen Politik Perempuan

Kerangka hukum mengenai keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia bertumpu pada konstruksi normatif yang dibangun melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem kepartaian dan pemilihan umum. Ketentuan afirmatif mengenai kuota perempuan secara eksplisit tercantum dalam Pasal 245 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengharuskan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya tiga puluh persen perempuan dalam daftar bakal calon legislatif. Norma tersebut diperkuat melalui ketentuan teknis Komisi Pemilihan Umum yang mengatur penerapan sistem zipper dalam daftar calon sehingga setiap tiga calon memuat minimal satu kandidat perempuan. Perspektif hukum tata negara memandang kebijakan afirmatif sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan struktural dalam representasi politik yang selama ini didominasi laki-laki. Literatur ilmu politik menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas demokrasi karena kehadiran perempuan dalam parlemen berkorelasi dengan peningkatan kebijakan sensitif gender dan distribusi kekuasaan yang lebih inklusif (Asiedu et al., 2018).

Struktur normatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional yang menempatkan kesetaraan sebagai prinsip fundamental negara hukum demokratis. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi perlakuan khusus guna mencapai kesetaraan substantif. Pendekatan teleologis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan tidak dimaksudkan sebagai privilese politik, melainkan sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan historis dalam akses politik. Perspektif teori gender kritis bahkan menilai bahwa identitas politik perempuan dibentuk melalui struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sehingga intervensi hukum diperlukan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut (Butler, 1990). Implementasi kebijakan afirmatif dalam sistem pemilu Indonesia juga terkait erat dengan sistem proporsional terbuka yang memberi ruang kompetisi langsung antar kandidat dalam satu partai (Ekayanta, 2024). Konsekuensi sistemik dari konfigurasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tetapi juga oleh dinamika internal partai politik.

Temuan empiris yang diperoleh dari analisis dokumen partai serta wawancara dengan kader perempuan menunjukkan bahwa implementasi norma afirmatif masih menghadapi berbagai kendala institusional. Beberapa kader perempuan menyatakan bahwa pencalonan perempuan dalam daftar calon sering kali dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa diikuti dukungan politik yang setara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik organisasi partai dalam proses rekrutmen politik. Literatur mengenai sistem kepartaian menegaskan bahwa partai politik merupakan institusi yang memiliki otonomi organisasi dalam menentukan strategi elektoral serta distribusi posisi kandidat (Haris, 2014). Konsekuensinya, efektivitas kebijakan afirmatif sangat bergantung pada komitmen internal partai dalam membangun mekanisme kaderisasi perempuan yang berkelanjutan.

Kondisi empiris mengenai keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah perempuan terjadi secara bertahap namun belum mencapai ambang batas representasi kritis. Data pemilu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat masih berada pada kisaran dua puluh persen dari total anggota parlemen. Fakta empiris tersebut menegaskan bahwa keberadaan kuota perempuan belum sepenuhnya menghasilkan representasi substantif dalam lembaga legislatif. Penelitian mengenai dinamika demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa sistem kepartaian masih didominasi oleh elite politik yang memiliki kontrol kuat terhadap proses pencalonan (Agustino et al., 2023). Dominasi elite tersebut menciptakan konfigurasi kekuasaan yang sering kali membatasi peluang perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam daftar calon.

Tinjauan terhadap praktik rekrutmen politik dalam beberapa partai menunjukkan bahwa proses seleksi kandidat tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas kader melainkan juga pada kalkulasi elektoral dan jaringan kekuasaan. Perspektif teori rekrutmen politik menjelaskan bahwa partai berfungsi sebagai gatekeeper yang menentukan siapa yang dapat mengakses arena kompetisi elektoral (Norris, 2006). Dalam konteks tersebut, perempuan sering kali menghadapi hambatan tambahan berupa keterbatasan akses terhadap jaringan politik dan sumber daya kampanye. Kajian empiris mengenai sistem rekrutmen kandidat dalam partai politik Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme seleksi

sering kali dipengaruhi oleh relasi patronase antara elite partai dan kandidat (Hidayat, 2025). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya mampu mengubah struktur kekuasaan internal partai.

Penelitian sosio-legal mengenai rekrutmen politik perempuan juga mengidentifikasi adanya fenomena glass ceiling dalam struktur organisasi partai. Fenomena tersebut merujuk pada hambatan tidak terlihat yang membatasi mobilitas politik perempuan menuju posisi kepemimpinan strategis. Hambatan tersebut muncul dalam bentuk stereotip gender, distribusi peran domestik, serta akses terbatas terhadap sumber daya politik. Analisis mengenai fenomena ini menunjukkan bahwa struktur patriarki dalam organisasi politik masih mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Manik et al., 2025). Dalam konteks hukum politik, fenomena tersebut menunjukkan bahwa norma afirmatif belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik organisasi partai.

Proses rekrutmen politik dalam partai politik juga berkaitan dengan konsep demokrasi internal partai yang menjadi indikator kualitas sistem kepartaian. Penelitian mengenai demokrasi internal partai menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi dalam proses seleksi kandidat merupakan elemen penting dalam sistem politik demokratis (Safa'at & Permadi, 2024). Apabila proses rekrutmen kandidat didominasi oleh keputusan elite partai, maka peluang kelompok marginal termasuk perempuan akan semakin terbatas. Perspektif hukum tata negara menempatkan partai politik sebagai institusi publik yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memperkuat demokrasi. Dalam kerangka tersebut, penerapan kebijakan afirmatif seharusnya diikuti oleh reformasi internal partai guna memastikan akses politik yang lebih inklusif.

Dalam konteks empiris, wawancara dengan beberapa anggota legislatif perempuan menunjukkan bahwa pengalaman mereka dalam proses pencalonan sering kali dipengaruhi oleh faktor elektabilitas dan kekuatan jaringan lokal. Kandidat perempuan yang memiliki basis sosial atau jaringan organisasi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan partai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial dan jaringan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang perempuan dalam kompetisi elektoral. Analisis komparatif terhadap praktik rekrutmen partai juga menunjukkan adanya variasi dalam strategi pencalonan perempuan di berbagai daerah pemilihan. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal.

Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif memerlukan sinergi antara regulasi negara dan reformasi organisasi partai. Tanpa adanya mekanisme kaderisasi yang sistematis, pencalonan perempuan hanya akan bersifat administratif dan tidak menghasilkan perubahan struktural dalam distribusi kekuasaan politik. Perspektif hukum kelembagaan menekankan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab normatif untuk mengembangkan sistem rekrutmen yang transparan dan inklusif. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan politik, penguatan organisasi sayap perempuan, serta pembukaan akses kepemimpinan bagi kader perempuan. Konsep ini sejalan dengan gagasan reformasi partai politik yang menekankan pentingnya transformasi institusional dalam sistem demokrasi (Sakinah et al., 2025).

Pemahaman mengenai dinamika implementasi kebijakan afirmatif juga perlu dilihat dalam konteks perkembangan sistem kepartaian di Indonesia. Sistem multipartai yang kompetitif menciptakan insentif bagi partai untuk merekrut kandidat yang dianggap memiliki peluang elektoral tinggi. Situasi tersebut sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan karena keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Kajian komparatif mengenai sistem kepartaian menunjukkan bahwa struktur organisasi partai memiliki pengaruh besar terhadap peluang representasi kelompok minoritas (Wasi, 2025). Analisis tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tetapi juga oleh transformasi budaya politik dalam organisasi partai.

Tabel 1. Pemetaan Kerangka Hukum Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia

Regulasi	Pasal Kunci	Norma Hukum	Implikasi terhadap Rekrutmen Politik
UUD 1945	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2)	Kesetaraan di hadapan hukum dan kebijakan afirmatif	Landasan konstitusional bagi

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Pasal 245–246	Kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif	kebijakan kuota perempuan Kewajiban administratif bagi partai politik
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Pasal 2 ayat (5)	Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai	Penguatan kaderisasi perempuan
PKPU tentang Pencalonan Legislatif	Ketentuan zipper system	Setiap tiga calon terdapat minimal satu perempuan	Distribusi posisi kandidat perempuan dalam daftar calon

Sumber data: Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan analisis peneliti (2026).

Kerangka normatif tersebut memperlihatkan bahwa negara telah menyediakan instrumen hukum yang relatif komprehensif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tidak secara otomatis menghasilkan perubahan struktural dalam praktik politik. Proses rekrutmen politik dalam partai masih dipengaruhi oleh kalkulasi strategis yang sering kali mengutamakan elektabilitas kandidat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik organisasi partai. Pendekatan sosio-legal terhadap fenomena ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada dinamika sosial dan politik yang memengaruhi implementasinya.

Dinamika Implementasi Kebijakan Kuota Gender dalam Rekrutmen Politik Perempuan pada Partai Demokrat dan Partai Golkar

Konstruksi normatif mengenai keterwakilan perempuan dalam politik elektoral Indonesia berakar pada ketentuan afirmatif yang diatur dalam kerangka hukum pemilu dan partai politik. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh persen dalam daftar bakal calon legislatif. Norma ini diperkuat oleh Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan kewajiban partai untuk menyertakan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan serta proses kaderisasi politik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengadopsi prinsip affirmative action sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan representasi politik berbasis gender. Literatur politik komparatif menegaskan bahwa kebijakan kuota gender merupakan strategi institusional yang dirancang untuk memperluas akses perempuan terhadap arena politik yang sebelumnya didominasi oleh elite laki-laki (Norris, 2006).

Secara empiris, implementasi norma afirmatif tersebut menunjukkan variasi dalam praktik internal partai politik yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen kandidat perempuan. Wawancara dengan anggota legislatif perempuan mengindikasikan bahwa Partai Demokrat cenderung mengintegrasikan proses kaderisasi melalui jalur organisasi sayap dan pelatihan kepemimpinan partai sebelum kandidat perempuan diajukan dalam daftar pencalonan legislatif. Pola ini sejalan dengan argumentasi mengenai pentingnya institusionalisasi partai dalam membangun mekanisme kaderisasi yang berkelanjutan dalam sistem demokrasi elektoral (Agustino et al., 2023). Sebaliknya, praktik rekrutmen dalam Partai Golkar lebih sering melibatkan jaringan organisasi sosial serta organisasi sayap perempuan yang berperan sebagai ruang mobilisasi kader politik perempuan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma kuota tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada struktur organisasi internal partai (Haris, 2014).

Variasi praktik rekrutmen tersebut dapat dipahami melalui pendekatan sosio-legal yang menempatkan institusi partai sebagai aktor utama dalam menerjemahkan norma hukum menjadi praktik politik konkret. Kajian mengenai seleksi kandidat dalam partai politik menunjukkan bahwa proses pencalonan sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor institusional, jaringan politik, dan modal sosial kandidat (Katz & Crotty, 2006). Dalam konteks Indonesia, sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memperkuat kompetisi intra-partai yang dapat memengaruhi peluang kandidat perempuan dalam memperoleh dukungan elektoral (Ekayanta, 2024). Wawancara dengan legislator perempuan menunjukkan bahwa dukungan struktur

partai sangat menentukan keberhasilan kandidat perempuan dalam proses pencalonan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan dalam organisasi partai.

Kondisi empiris tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara mekanisme kaderisasi dan peluang representasi perempuan dalam politik elektoral. Beberapa studi menunjukkan bahwa partai politik yang memiliki sistem kaderisasi yang lebih terstruktur cenderung menghasilkan peluang representasi perempuan yang lebih stabil dalam lembaga legislatif (Antonio, 2023). Dalam konteks Partai Demokrat, kaderisasi formal melalui pelatihan politik dan pendidikan kepemimpinan partai memberikan ruang bagi perempuan untuk membangun kapasitas politik sebelum memasuki kompetisi elektoral. Sementara itu, Partai Golkar lebih menekankan pada mobilisasi jaringan organisasi sosial dan organisasi sayap perempuan seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar sebagai jalur rekrutmen politik (Ayu et al., 2025). Model institusional tersebut mencerminkan perbedaan strategi organisasi dalam mengintegrasikan kader perempuan dalam struktur partai.

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Rekrutmen Politik Perempuan pada Partai Demokrat dan Partai Golkar

Aspek Rekrutmen	Partai Demokrat	Partai Golkar
Mekanisme kaderisasi	Pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik partai	Mobilisasi organisasi sayap perempuan dan jaringan sosial
Proses seleksi kandidat	Seleksi internal berbasis evaluasi kaderisasi	Seleksi berbasis jaringan organisasi dan dukungan elite
Dukungan organisasi	Struktur kaderisasi partai dan pelatihan politik	Organisasi sayap perempuan (KPPG)
Strategi pencalonan	Penguatan kapasitas kader perempuan	Mobilisasi jaringan sosial dan politik

Sumber data: Hasil olahan data wawancara dan analisis dokumen partai (2025), Pratiwi et al., 2022, Ayu et al., 2025.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa kedua partai politik mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menerjemahkan kewajiban hukum mengenai keterwakilan perempuan dalam politik elektoral. Partai Demokrat menekankan proses kaderisasi formal sebagai sarana pembentukan kapasitas politik perempuan sebelum memasuki arena pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep professionalization of political elites yang menekankan pentingnya pelatihan politik dalam membentuk kompetensi legislator (Antonio, 2023). Sementara itu, Partai Golkar memanfaatkan jaringan organisasi sosial dan organisasi sayap perempuan sebagai jalur mobilisasi kandidat politik perempuan. Strategi ini mencerminkan pola rekrutmen berbasis jaringan yang lazim ditemukan dalam sistem kepartaian yang memiliki akar historis kuat dalam organisasi sosial (Haris, 2014).

Implikasi normatif dari perbedaan strategi tersebut berkaitan dengan efektivitas kebijakan kuota gender dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengharuskan keterwakilan perempuan minimal tiga puluh persen dalam daftar calon legislatif, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen nasional masih berada di bawah angka tersebut (Kompas, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan norma afirmatif belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dalam sistem politik. Kajian empiris menunjukkan bahwa hambatan tersebut sering berkaitan dengan praktik seleksi kandidat yang masih didominasi oleh elite partai (Hizbullah, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik dalam sistem kepartaian Indonesia.

Dalam perspektif teori representasi politik, keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif memiliki implikasi substantif terhadap pembentukan kebijakan publik yang sensitif terhadap isu gender. Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan di parlemen berkorelasi dengan meningkatnya peluang lahirnya kebijakan yang responsif terhadap kepentingan perempuan (Asiedu et al., 2018). Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan afirmatif tidak hanya berkaitan dengan representasi simbolik, tetapi juga dengan representasi substantif dalam proses legislasi. Wawancara dengan anggota legislatif perempuan menunjukkan bahwa dukungan institusi partai menjadi faktor penting dalam memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa rekrutmen politik perempuan merupakan bagian integral dari proses demokratisasi yang lebih luas.

Analisis sosio-legal terhadap praktik rekrutmen politik perempuan juga menunjukkan adanya pengaruh faktor kultural dalam struktur partai politik. Beberapa studi mengidentifikasi adanya fenomena glass ceiling yang membatasi peluang perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan politik dalam organisasi partai (Manik et al., 2025). Hambatan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial dan persepsi mengenai peran gender dalam politik. Dalam wawancara dengan legislator perempuan, beberapa responden menyatakan bahwa proses pencalonan sering kali dipengaruhi oleh persepsi elite partai mengenai elektabilitas kandidat perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup tanpa transformasi budaya politik dalam organisasi partai.

Peran organisasi sayap perempuan juga menjadi elemen penting dalam memperluas ruang partisipasi politik perempuan dalam partai politik. Dalam Partai Golkar, organisasi Kesatuan Perempuan Partai Golkar memainkan peran sebagai ruang kaderisasi dan mobilisasi politik bagi anggota perempuan (Ayu et al., 2025). Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas sosial, tetapi juga sebagai saluran strategis untuk mempersiapkan kader perempuan memasuki kompetisi elektoral. Studi mengenai strategi politik partai menunjukkan bahwa keberadaan organisasi sayap dapat memperkuat kapasitas partai dalam menjaring kandidat politik dari berbagai kelompok sosial (Saputra et al., 2025). Dengan demikian, organisasi sayap perempuan memiliki peran strategis dalam memperluas basis rekrutmen politik perempuan.

Refleksi normatif terhadap dinamika tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan kuota gender bergantung pada integrasi antara regulasi hukum dan reformasi kelembagaan partai politik. Literatur hukum tata negara menekankan bahwa partai politik merupakan institusi utama dalam proses rekrutmen politik dalam sistem demokrasi konstitusional (Safa'at & Permadi, 2024). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan afirmatif sangat dipengaruhi oleh tingkat demokrasi internal partai dalam menentukan kandidat politik. Reformasi kelembagaan partai yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi kandidat dapat meningkatkan peluang representasi perempuan dalam politik elektoral. Perspektif ini menegaskan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya memerlukan perubahan regulasi, tetapi juga transformasi struktur organisasi partai politik.

Analisis Tingkat Keberhasilan Caleg Perempuan dalam Mekanisme Rekrutmen Politik Partai dan Dinamika Sistem Proporsional Terbuka

Representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan kuota dalam pencalonan, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas mekanisme rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik. Kerangka hukum nasional melalui Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan kewajiban partai politik untuk mencalonkan perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen dalam daftar calon legislatif pada setiap daerah pemilihan. Norma hukum tersebut membentuk kerangka afirmatif yang bertujuan memperluas partisipasi politik perempuan dalam proses elektoral nasional. Perspektif teoritis mengenai rekrutmen politik menjelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai institusi utama yang menentukan seleksi kandidat melalui proses kaderisasi, penilaian elektabilitas, serta pertimbangan strategis lainnya (Norris, 2006). Dalam konteks tersebut, tingkat keberhasilan caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi partai dalam mengintegrasikan kebijakan afirmatif dengan mekanisme rekrutmen politik yang kompetitif.

Pendekatan empiris terhadap proses rekrutmen kandidat menunjukkan bahwa mekanisme seleksi internal partai sering kali dipengaruhi oleh kombinasi antara pertimbangan elektabilitas kandidat dan dinamika politik internal organisasi. Penelitian mengenai sistem kepartaian di Indonesia menunjukkan bahwa partai politik memiliki otonomi kelembagaan yang luas dalam menentukan proses seleksi kandidat legislatif (Haris, 2014). Dalam praktik organisasi partai, keputusan mengenai pencalonan sering melibatkan struktur elit partai yang mempertimbangkan faktor elektoral, jaringan politik lokal, serta kapasitas mobilisasi pemilih. Situasi tersebut menyebabkan peluang keterpilihan perempuan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal tetapi juga oleh praktik organisasi partai yang berkembang secara informal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kader perempuan yang memiliki pengalaman organisasi dan jaringan politik yang luas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan partai dalam proses pencalonan.

Kajian mengenai dinamika rekrutmen politik perempuan dalam partai politik menunjukkan bahwa struktur kaderisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas kandidat perempuan untuk bersaing dalam pemilu legislatif. Studi mengenai organisasi sayap perempuan dalam partai politik menunjukkan bahwa keberadaan organisasi kader perempuan dapat memperkuat basis politik kandidat perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, serta pengembangan jaringan sosial (Ayu et al., 2025). Struktur kaderisasi tersebut berfungsi sebagai sarana institusional untuk meningkatkan kompetensi politik perempuan dalam menghadapi kompetisi elektoral. Perspektif kelembagaan partai juga menekankan bahwa organisasi partai yang memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur cenderung lebih efektif dalam mempromosikan kader perempuan ke posisi politik strategis (Agustino et al., 2023). Dengan demikian, tingkat keberhasilan caleg perempuan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan afirmatif, struktur kaderisasi partai, dan kapasitas individu kandidat.

Perkembangan sistem pemilu Indonesia juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peluang keterpilihan caleg perempuan dalam kontestasi elektoral. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu legislatif nasional memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan kandidat secara langsung berdasarkan perolehan suara terbanyak. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan jumlah suara individual kandidat. Dalam perspektif hukum pemilu, sistem tersebut menggeser fokus kompetisi dari nomor urut daftar calon menuju kompetisi suara personal kandidat di daerah pemilihan. Perubahan tersebut menciptakan dinamika baru dalam rekrutmen politik perempuan karena kandidat perempuan harus bersaing secara langsung dengan kandidat lain dalam memperoleh dukungan pemilih.

Interpretasi historis terhadap sistem proporsional terbuka juga berkaitan dengan perkembangan yurisprudensi konstitusional di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat menuntut penentuan wakil rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak oleh kandidat dalam pemilu legislatif. Keputusan tersebut mengubah mekanisme penentuan calon terpilih yang sebelumnya lebih bergantung pada nomor urut daftar calon yang ditentukan oleh partai politik. Dalam kerangka tersebut, peluang keterpilihan kandidat perempuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka membangun dukungan elektoral secara langsung di daerah pemilihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kuota perempuan dalam daftar calon tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Keberhasilan Caleg Perempuan dalam Sistem Proporsional Terbuka

Partai Politik	Jumlah Caleg Perempuan	Caleg Perempuan Terpilih	Persentase Keberhasilan
Partai Demokrat	168	18	10,7%
Partai Golkar	181	25	13,8%

Sumber data: Kompilasi data pemilu legislatif dari GoodStats (2024), Kompas (2024), MedanBisnisDaily (2023).

Data empiris pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan caleg perempuan berbeda antara Partai Demokrat dan Partai Golkar dalam pemilu legislatif nasional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme rekrutmen politik dalam partai memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang keterpilihan kandidat perempuan. Literatur mengenai organisasi partai menekankan bahwa institusionalisasi partai politik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas representasi politik dalam sistem demokrasi elektoral (Katz & Crotty, 2006). Partai yang memiliki sistem kaderisasi yang kuat cenderung mampu mempersiapkan kandidat perempuan untuk bersaing secara efektif dalam kontestasi elektoral. Dalam konteks tersebut, keberhasilan kandidat perempuan tidak hanya bergantung pada kebijakan kuota tetapi juga pada efektivitas struktur organisasi partai.

Analisis terhadap dinamika kompetisi dalam sistem proporsional terbuka menunjukkan bahwa kandidat perempuan menghadapi tantangan tambahan dalam membangun basis dukungan elektoral yang stabil. Penelitian mengenai dinamika keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan bahwa

kompetisi suara personal sering kali memberikan keuntungan bagi kandidat yang memiliki sumber daya politik lebih besar (Pamungkas & Ardiansyah, 2024). Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan peluang antara kandidat yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan kandidat yang memiliki jaringan politik terbatas. Dalam banyak kasus, kandidat perempuan harus mengembangkan strategi kampanye berbasis komunitas untuk memperkuat hubungan dengan pemilih lokal. Pendekatan tersebut mencerminkan adaptasi strategis kandidat perempuan dalam menghadapi kompetisi elektoral yang semakin personalistik.

Hambatan struktural terhadap keberhasilan caleg perempuan juga berkaitan dengan faktor kultural yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik. Penelitian mengenai fenomena glass ceiling dalam organisasi politik menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi hambatan kultural yang membatasi akses mereka terhadap posisi kepemimpinan politik (Manik et al., 2025). Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari struktur partai tetapi juga dari konstruksi sosial mengenai peran gender dalam masyarakat. Perspektif teori performativitas gender menjelaskan bahwa identitas gender dibentuk melalui praktik sosial yang berulang yang menghasilkan norma tertentu mengenai kepemimpinan politik (Butler, 1990). Dalam konteks tersebut, preferensi pemilih terhadap kandidat perempuan sering dipengaruhi oleh stereotip gender yang berkembang dalam masyarakat.

Analisis terhadap dinamika organisasi partai menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat perempuan dalam pemilu juga berkaitan dengan tingkat demokrasi internal partai politik. Kajian mengenai demokrasi internal partai menunjukkan bahwa proses seleksi kandidat yang transparan dan partisipatif dapat meningkatkan peluang perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam pencalonan legislatif (Safa'at & Permadi, 2024). Dalam sistem kepartaian yang demokratis, proses rekrutmen politik seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kader tanpa diskriminasi gender. Penelitian mengenai reformasi partai politik juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme kaderisasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas representasi politik (Sakinah et al., 2025). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa reformasi institusional partai politik merupakan prasyarat penting bagi peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Perbandingan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat perempuan dalam sistem proporsional terbuka dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor institusional, strategi kampanye, serta kekuatan jaringan politik lokal. Penelitian mengenai strategi politik partai dalam pemilu menunjukkan bahwa organisasi partai yang mampu mengintegrasikan kaderisasi, mobilisasi pemilih, dan dukungan kampanye memiliki peluang lebih besar dalam memenangkan kontestasi elektoral (Sulistyarini et al., 2025). Dalam konteks tersebut, kandidat perempuan yang memperoleh dukungan organisasi partai yang kuat memiliki peluang elektoral yang lebih besar dibandingkan kandidat yang hanya mengandalkan jaringan personal. Perspektif komparatif dalam studi sistem kepartaian juga menunjukkan bahwa variasi struktur organisasi partai dapat mempengaruhi efektivitas rekrutmen politik perempuan (Wasi, 2025). Analisis tersebut menegaskan bahwa hubungan antara sistem pemilu, struktur partai, dan strategi kampanye merupakan faktor utama yang menentukan peluang keterpilihan perempuan dalam politik elektoral Indonesia.

KESIMPULAN

Rekrutmen politik perempuan dalam partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara kerangka regulasi elektoral, struktur organisasi partai, serta kondisi sosial-kultural yang membentuk partisipasi politik perempuan. Kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan landasan afirmatif melalui kebijakan kuota minimal tiga puluh persen perempuan dalam pencalonan legislatif, namun implementasinya sangat bergantung pada mekanisme seleksi kandidat, pola kaderisasi, serta distribusi dukungan politik di dalam partai. Analisis komparatif menunjukkan bahwa baik Partai Demokrat maupun Partai Golkar secara formal membuka ruang bagi keterlibatan perempuan melalui kaderisasi, organisasi sayap perempuan, serta pendidikan politik, tetapi akses perempuan terhadap posisi strategis dalam proses pencalonan masih dipengaruhi oleh faktor elektabilitas, kekuatan jaringan politik, dan dominasi elite partai yang mayoritas laki-laki. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, keberhasilan kandidat perempuan semakin ditentukan oleh kemampuan membangun dukungan elektoral personal di daerah pemilihan, sehingga kesenjangan sumber daya politik sering kali mempengaruhi peluang keterpilihan. Dengan demikian, peningkatan representasi politik perempuan

tidak hanya memerlukan kepatuhan formal terhadap kebijakan afirmatif, tetapi juga reformasi institusional partai, penguatan sistem kaderisasi perempuan, serta transformasi budaya politik yang lebih inklusif terhadap kepemimpinan perempuan dalam demokrasi elektoral Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Sylviana, M., & Silas, J. (2023). Institusionalisasi Dan Ketahanan Partai Dalam Demokrasi Elektoral Indonesia: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 105-130. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.129>
- Antonio, R. (2023). Pengembangan Profesionalitas Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Reformulasi Partai Politik. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 211-233. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.316>
- Asiedu, E., Branstetter, C., Gaekwad-Babulal, N., & Malokele, N. (2018, January 5–7). *The effect of women's representation in parliament and the passing of gender sensitive policies* [Paper presentation]. ASSA Annual Meeting, Philadelphia, PA, United States. <https://www.aeaweb.org/conference/2018/preliminary/paper/an5yEb5h>
- Ayu, R. S., Dewi, A., Putri, N. F., & Ummah, A. (2025). Analisis Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Golkar: Studi Kasus Peran Dan Strategi Organisasi Sayap Kppg. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 55-65. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.473>
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Ekayanta, F. B. (2024). Kesenambungan Sistem Proporsional Terbuka sebagai Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 201-217. <https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.201-2017>
- GoodStats. (2024). *Persentase perempuan di DPR RI berdasarkan partai politik*. goodstats.id
- Gunawan, W., & Nurdin, N. (2025). Analisis Penerapan Kuota Gender Kandidat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 220-238. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3730>
- Haris, S. (2014). *Partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayat, A. (2025). Compartmentalization Structured Candidate Selection untuk Fungsionalisasi Partai Politik dalam Pilkada Berbasis Good Election. *Law Research Review Quarterly*, 11(2). <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.27966>
- Hizbullah, Z. (2023). Studi Komparatif Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan PPP dan PAN di Kota Tangerang. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 76-89. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.76-89>
- Katz, R. S., & Crotty, W. (Eds.). (2006). *Handbook of party politics*. SAGE Publications.
- Kompas. (2023). *Partai politik yang belum memenuhi kuota perempuan di beberapa dapil*. www.kompas.id
- Kompas. (2024). *Keterwakilan perempuan di parlemen masih di bawah 30 persen*. www.kompas.id
- Manik, E. P., Erawan, I. K. P., & Pramana, G. I. (2025). Tantangan Kultural dan Struktural terhadap Kepemimpinan Politik Perempuan: Studi Literatur tentang Fenomena Glass Ceiling dalam Partai Politik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(3), 41-50. <https://doi.org/10.9963/gtnjm777>
- MedanBisnisDaily. (2023). *Data keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap Pemilu 2024*. medanbisnisdaily.com
- Ndarinu, A., Susu, M. T., & Hurek, U. O. (2024). Strategi Politik Dpd Partai Demokrat Ntt Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Di Dapil NTT 1 Kota Kupang). *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 744-761. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.187>

- Norris, P. (2006). *Recruitment and representation*. Cambridge University Press.
- Pamungkas, S. H., & Ardiansyah, A. (2024). Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia: Affirmative Action Keterwakilan Di DPR dan DPD RI. *Journal de Facto*, 11(1), 17-26. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v11i1.217>
- Pratiwi, C. S., Beriansyah, A., & Muhammad, H. A. (2022). Rekrutmen Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif Studi Perempuan Partai Demokrat Provinsi Jambi Tahun 2019. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 177-190. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v11i2.3293>
- Rahayu, E. B. (2023). Analisis Rekrutmen Politik Kader Perempuan Pada Partai Amanat Nasional Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 19-28. <https://doi.org/10.58794/sumur.v1i1.473>
- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 170-191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>
- Safa'at, M. A., & Permadi, H. (2024). Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 219-242. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art10>
- Sakinah, S., Nur, I. T., & Hamzah, H. (2025). Reformasi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Normatif Dan Kelembagaan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 1204-1227. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7506>
- Saputra, D. T., Aji, M. P., Ilmar, A., & Juned, M. (2025). Partai Islam dan Pemilu 2024. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 6(1), 1-41. <https://doi.org/10.33822/jpds.v6i1.9531>
- Sulistiyarini, D. A., Latif, M., & Kurniawan, D. W. (2025). Strategi Mempertahankan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD: Studi DPC Partai Gerindra Kota Semarang. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 215-227. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1331>
- Sutarto, S. (2022). Analisis Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Di Dpd Partai Nasdem Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Di Kantor Dpd Partai Nasdem Kota Medan). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 53-80. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.292>
- Titale, O. P., Amaliatulwalidain, A., & Isabella, I. (2025). Pola Rekrutmen Partai PDIP Dalam Menetapkan Kandidat Calon DPRD Tingkat 1 Sumatra Selatan. *TheJournalish: Social and Government*, 6(2), 203-211. <https://doi.org/10.55314/tsg.v6i2.894>
- Waqos, A., Huda, D. N. K., & Purnomo, M. (2022). Sistem Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Menentukan Calon Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 55-67. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20950>
- Wasi, I. (2025). Sistem Kepartaian di Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Studi Komparasi Politik. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 3(2), 42-52. <https://doi.org/10.53611/xf5t1f90>
- Wulandari, M. P., Zahro, M. N., & Sujoko, A. (2022). Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa). *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 26-49. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2022.014.01.4>